

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lahirnya revolusi informasi sebagai akibat dari perkembangan bidang komunikasi dan elektronika telah menciptakan perubahan yang sangat cepat dan bersifat global. Hal ini menuntut setiap individu untuk berusaha tahu banyak, berbuat banyak dan memiliki keunggulan namun tetap memegang teguh nilai-nilai moral.

Dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang paling bertanggungjawab untuk bisa menjawab tantangan abad ini dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan mampu bersaing. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan yang bermutu, mutlak harus dilakukan dan menjadi prioritas bagi pemerintah dan semua kalangan. Peningkatan mutu pendidikan nasional akan tercipta dengan adanya sinergi antara berbagai komponen yang memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Upaya mewujudkan cita-cita pembangunan nasional, Negara Republik Indonesia menempatkan pendidikan pada posisi dan peran yang sangat strategis dalam akselerasi pembangunan karena pendidikan merupakan sektor yang sangat menentukan kualitas suatu bangsa. Kegagalan pendidikan berimplikasi pada gagalnya suatu bangsa, keberhasilan pendidikan juga secara otomatis membawa keberhasilan suatu

bangsa. Hal sebagaimana tersirat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) tahun 1945 yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara Republik Indonesia adalah: “Mencerdaskan kehidupan bangsa...”¹ dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, ras, etnis, agama, dan gender.

Dalam upaya mewujudkan cita-cita UUD 1945 tersebut di atas, pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (KEMDIKBUD) Republik Indonesia mengeluarkan visi dan misi pendidikan nasional tahun 2015-2019 sebagai berikut²:

Visi: Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong.

Misi :

1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat.
2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan.
3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu.
4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa.
5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

¹ UUD Tahun 1945, diakses dari www.jdih.ristekdikti.go.id pada Kamis 04 April 2019, pukul 20.00 WIB.

² Kemdikbud RI, *Visi, Misi dan Tujuan Strategis Pendidikan Nasional*, <https://www.kemdikbud.go.id>

Tujuan Strategis :

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan aparatur institusi pendidikan dalam ekosistem pendidikan.
2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
3. Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas, dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus.
4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
5. Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.
6. Peningkatan sistem tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Hal ini dimaksudkan sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang adil, dan makmur serta memungkinkan para warganya mengembangkan diri, baik berkenaan dengan aspek jasmaniah maupun rohaniah.

Namun kenyataannya, pendidikan di negara ini belum ditempatkan pada posisi yang sewajarnya. Kondisi seperti ini dapat dilihat dalam berbagai segi, diantaranya pengelolaan pendidikan yang belum efisien dan belum berorientasi pada mutu, demokratis, berkeadilan, serta partisipatif. Hal ini terjadi sebagai akibat pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan belum bermutu sehingga peningkatan mutu pendidikan pun belum terwujud.

Untuk bisa menyelenggarakan pendidikan yang bermutu harus didukung oleh faktor-faktor penunjang proses pendidikan yang bermutu seperti administrator, guru, konselor dan tata

usaha yang bermutu dan profesional, selain sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang memadai, biaya yang mencukupi, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang mendukung.³

Selain itu, untuk menjamin terjadinya proses pendidikan yang benar dan bermutu, diperlukan kegiatan pengawasan atau supervisi. Hal ini dimaksudkan sebagai kegiatan kontrol terhadap seluruh kegiatan pendidikan, mengarahkan, mengawasi, membina dan mengendalikan dalam pencapaian tujuan. Lebih jauh, supervisi bertanggung jawab dalam peningkatan mutu pendidikan, baik proses maupun hasilnya, sehingga kegiatan kepengawasan dilakukan sejak dari tahap perencanaan sampai pada tahap evaluasi yang akan berfungsi sebagai *feed back* tindak lanjut dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan kearah yang lebih baik.⁴

Supervisi diartikan sebagai usaha dari petugas-petugas sekolah dalam memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Atau dengan kata lain,

³ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengendalian Mutu pendidikan: Konsep, Prinsip dan Instrumen*. (PT. Refika Aditama. 2010), 7.

⁴ Hanifuddin Jamin, Djailani, Bahrin. "Supervisi Pengawas Madrasah dalam Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru pada MIN Meulaboh Kabupaten Aceh Barat" *Jurnal Administrasi Pendidikan*, Volume 3, No. 2, Mei 2015

supervisi adalah bantuan dan layanan kepada para guru untuk memperbaiki pengajarannya.⁵

Sementara menurut Aedi, pengawasan juga dimaksudkan untuk menunjukkan kelemahan yang ada dalam pelaksanaan serta melakukan upaya perbaikan serta pencegahan agar kelemahan atau kesalahan tersebut tidak terulang kembali.⁶

Orang yang melakukan supervisi atau kepengawasan disebut supervisor atau pengawas. Nana Sudjana mendefinisikan pengawas sebagai sebuah jabatan fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan dalam upaya meningkatkan proses dan hasil belajar guna mencapai tujuan pendidikan.⁷

Dasar filosofis supervisi pendidikan kerangka dari pemahaman tentang suatu sistem pendidikan dikatakan berhasil dan berdaya guna bila berakar mendalam pada nilai-nilai yang ada dalam pandangan hidup suatu bangsa. Konsep-konsep filosofi pendidikan yang bersifat abstrak perlu untuk diterjemahkan ke dalam pengertian yang lebih operasional.⁸

⁵ Piet A Sahertian, *Konsep Dasar & Teknik Supervisi Pendidikan Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 19.

⁶ Nur Aedi, *Pengawasan Pendidikan: Tinjauan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2104), 2.

⁷ Nana Sudjana, dkk, *Standar Mutu Pengawas*, (Dirjen Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Departemen Pendidikan Nasional, 2006)

⁸ Solichah, "Implementasi Supervisi Akademik Pengawas Pendidikan Agama Islam Dalam Meningkatkan Kinerja Guru PAI di SDN 4 Tamansari Kecamatan Gedongtataan". *Repositori.radenintan.ac.id*. 2017, 26.

Supervisi pada dasarnya adalah proses pemberian bantuan kepada orang lain, artinya seseorang yang memiliki kompetensi lebih (supervisor) memberikan bantuan atau pertolongan kepada lembaga sekolah kaitannya dengan proses pendidikan yang berlangsung, dengan adanya bantuan ini pihak-pihak yang terkait dengan sekolah dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.⁹ Hal ini sejalan dengan ajaran Islam sangat menganjurkan untuk saling tolong menolong, sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur'an:5:2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(القُرْآنُ سُرَّةُ الْمَائِدَةِ : ٢)¹⁰

Artinya:

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya.”

(Q.S. Almâidah:2)¹¹

Di dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PERMENPAN dan RB RI) Nomor 21 Tahun 2010, pada pasal

⁹ Siti Patimah, *Manajemen Kepemimpinan Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2015), 145

¹⁰ Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, 2012), 142

¹¹ Kementerian Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya*, (Dirjen Bimas Islam, Direktorat Urais dan Pembinaan Syari'ah, 2012), 142

1 ayat 2, tentang jabatan fungsional pengawas sekolah/madrasah dan angka kreditnya dinyatakan bahwa pengawas sekolah/madrasah adalah: “Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pendidikan pada satuan pendidikan.”¹²

Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012, bab 1 (1) tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI) bahwa yang dimaksud pengawas madrasah adalah: “Seorang pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah”.¹³

Mengenai tugas pokok pengawas pendidikan dapat dilihat dalam PERMENPAN dan RB No.21 Tahun 2010 Pasal 5 sebagai berikut:

Tugas pokok pengawas sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru,

¹² PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010 pasal 1 ayat 1, Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*, sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses pada Tanggal 4 April 2019, pukul 20.30.

¹³ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI, Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI)*, Bab I Pasal 1, sumber: simpuk.kemenag.go.id diakses pada tanggal 3 April 2019, pukul 08.00, WIB

evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.¹⁴

Dari rumusan tersebut di atas, seorang pengawas dalam melakukan kegiatan supervisi fokus pada dua hal yaitu: supervisi akademik dan supervisi manajerial. Adapun komponen utamanya adalah penyusunan program, pelaksanaan program, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan membimbing dan melatih profesionalitas sumberdaya pendidikan.

Dalam melakukan supervisi akademik, pengawas madrasah berkewajiban membantu guru dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran untuk mencapai hasil belajar yang lebih optimal, sedangkan dalam pelaksanaan supervisi manajerial, pengawas berkewajiban membantu kepala sekolah dan staf sekolah untuk mempertinggi kinerja sekolah agar dapat meningkatkan mutu pendidikan pada sekolah yang dibinanya.¹⁵

Dalam Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/ Madrasah, Direktorat Tenaga Kependidikan, supervisi manajerial adalah supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi

¹⁴PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010, Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*, sumber: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id>, diakses pada 4 April 2019, pukul 20.30.

¹⁵ M. Said Husin dan Ety Nurbayani, "Potret Pengawasan Madrasah Aliyah se-Kota Samarinda: antara Cita dan Fakta", *jurnal fenomena*, volume v, no.1, 2013

sumberdaya manusia (SDM) kependidikan dan sumberdaya lainnya.¹⁶

Fokus kegiatan pengawasan manajerial adalah membina pelaksanaan pengelolaan sekolah sesuai semangat manajemen berbasis sekolah seperti pengelolaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kesiswaan, ketatausahaan, sarana prasarana, pembiayaan dan hubungan kerja dengan unsur-unsur terkait yang lainnya.¹⁷

Inilah esensi supervisi pendidikan oleh pengawas dalam pengembangan profesionalisme sumberdaya pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan yang berhubungan dengan usaha-usaha menciptakan kondisi belajar yang lebih baik.

Dari beberapa definisi di atas, tampak begitu jelas, bahwa eksistensi dan efektifitas supervisi atau kepengawasan, memiliki peran yang sangat besar dalam membina dan meningkatkan mutu sertaprofesionalitas lembaga pendidikan. Oleh karena itu, supervisi pengawas harus dilaksanakan secara profesional.

Namun demikian, fakta yang terjadi dalam dunia pendidikan, khususnya di lingkungan Kementerian Agama, masih banyak persoalan-persoalan yang terjadi dalam hal profesionalisme sumberdaya pendidikan, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang memadai, manajemen yang tepat, serta lingkungan yang mendukung.

¹⁶ Panduan Pelaksanaan Tugas Pengawas Sekolah/ Madrasah (Direktorat Tenaga Kependidikan, 2009), 20.

¹⁷ Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan; Membantu Mengatasi Kesulitan Guru Memberikan Layanan Belajar yang Bermutu* (Bandung: CV. Alfabeta, 2010), 155.

Dampak dari berbagai persoalan tersebut menyebabkan mutu dan prestasi peserta didik yang rendah. Hal ini terlihat dalam raihan nilai ujian nasional yang masih sangat rendah sehingga menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa sekolah madrasah tidak bermutu. Termasuk di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, khususnya pada tingkat Madrasah Ibtidaiyah.

Dalam pengamatan penulis, di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, berbagai persoalan menyangkut rendahnya sumberdaya pengelola lembaga pendidikan dan minimnya sarana prasarana pendidikan tersebut menjadi persoalan utama. Dari enam Madrasah Ibtidaiyah yang penulis kunjungi, secara keseluruhan jika dilihat dari kualitas sumberdaya pendidikan, khususnya sarana prasarana masih belum memadai. Salahsatunya, fasilitas yang paling dasar seperti ruang kelas belajar masih belum terpenuhi. Madrasah Ibtidaiyah Cigemblong rata-rata hanya memiliki 3 (tiga) ruang kelas belajar dari yang seharusnya 6 (enam) karena masing-masing memiliki 6 (enam) rombongan belajar.

Ini menunjukkan betapa minimnya sarana prasarana lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama tersebut. Selain itu, tenaga pendidik yang ada, belum sesuai dengan harapan. Dari 46 tenaga pengajar yang ada, belum seluruhnya memenuhi standar kualifikasi tenaga pengajar, baik secara kualitas maupun gelar akademiknya¹⁸.

¹⁸Hasil wawancara dengan Rusdin, Pengawas Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Cigemblong, Kabuptane Lebak, pada tanggal 03 April 2018 bertempat di kantor PENDAIS, Kecamatan Malingping.

Menurut hasil observasi penulis, banyak faktor yang menyebabkan hal ini terjadi, diantaranya: *pertama*, manajemen pengelolaan madrasah yang kurang baik, *kedua* manajemen pembiayaan dan minimnya anggaran pendidikan madrasah, *ketiga*, sarana prasarana yang masih jauh dari standar minimum, *keempat*, minimnya sumberdaya pengajar yang memenuhi kualifikasi dan *kelima*, kinerja pengawas yang kurang profesional dalam pelaksanaan supervisi manajerial dalam bidang pengembangan sumberdaya pendidikan dan mencari solusi terkait minimnya saranaprasarana.

Namun demikian, hal-hal yang dipaparkan di atas barulah sebatas pemahaman yang lahir dari pengamatan sementara di lapangan, khususnya di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten dan masih sangat prematur untuk diambil sebagai sebuah kesimpulan. Oleh karena itu perlu dilihat secara nyata dalam suatu usaha sistematis untuk mengkaji suatu masalah melalui penelitian ilmiah yang dituangkan dalam bentuk penulisan karya ilmiah ini.

Untuk itulah, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap supervisi manajerial pengawas Madrasah Ibtidaiyah bidang sarana prasarana di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang menarik untuk dijadikan landasan penelitian ini, diantaranya:

1. Efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kepengawasan sekolah madrasah yang dianggap bahwa pengawas madrasah kurang mengerti dan memahami tugas dan tanggungjawabnya secara profesional.
2. Berbagai persoalan yang ada dalam dunia pendidikan di lingkungan Kementerian Agama, khususnya di Madrasah Ibtidaiyah se Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, terkait dengan buruknya manajemen pengelolaan madrasah, minimnya anggaran dan sumberdaya pendidikan khususnya sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas, media, serta sumber belajar yang memadai, serta lingkungan yang mendukung yang berakibat pada rendahnya mutu pendidikan madrasah.

C. Batasan Masalah

Mengingat luasnya wilayah kajian tentang supervisi manajerial pengawas, maka dalam penelitian ini penulis membatasi kajian supervisi manajerial Pengawas Madrasah ini, hanya seputar pengawasan dalam bidang pengembangan sarana/prasarana di Madrasah Ibtidaiyah se Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan supervisi manajerial pengawas madrasah ibtidaiyah bidang sarana prasarana di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak?

2. Bagaimana faktor penghambat dan pendukung serta hasil yang dicapai dari pelaksanaan supervisi manajerial dalam bidang sarana prasarana oleh pengawas madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak?

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian yang akan penulis laksanakan di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi manajerial bidang sarana prasarana oleh pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dan pendukung serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan supervisi manajerial bidang sarana prasarana oleh pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoritis dan praktis antara lain sebagai berikut :

- a. Manfaat pengembangan keilmuan

Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil riset yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi manajerial pengawas bidang sarana prasarana di Madrasah Ibtidaiyah se Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak,

serta memberi sumbangan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab yang seharusnya diemban oleh pengawas madrasah ibtidaiyah.

b. Manfaat untuk lembaga Kementerian Agama Kabupaten Lebak

Digunakan untuk bahan pertimbangan dalam pengembangan supervisi pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dalam hal sumberdaya pendidikan khususnya bidang sarana prasarana.

3. Manfaat bagi pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah sebagai bahan rujukan, bahan pengembangan diri untuk lebih maju demi tercapainya cita-cita yang diharapkan.
4. Manfaat bagi peneliti dan pembaca lainnya, sebagai bahan rujukan penelitian lanjutan mengenai pelaksanaan supervisi manajerial pengawas Madrasah Ibtidaiyah (MI).

F. Penelitian Terdahulu

Untuk memastikan tingkat orisinilitas penelitian ini, berikut akan di tinjau beberapa hasil penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam mengembangkan analisis.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Topik Penelitian
1.	Ety Agustina, 2017 (Tesis: <i>Supervisi Pengawasan dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI di MIN 1</i>)	Fokus penelitiann tesis ini dilakukan terhadap masalah kualitas guru yang berpengaruh terhadap kualitas pen-didikan. Untuk itu dibutuhkan super- visi pengawas madrasah dan kepala madrasah. Melalui

	<i>Tanggamus Kabupaten Tanggamus)</i>	pengawasan yang dilakukan tersebut diharapkan kinerja guru akan lebih baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pelaksanaan supervisi yang dilakukan Pengawas dan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MIN 1 Tanggamus. ¹⁹
2.	Mustakin, 2016 (Tesis: <i>Analisis Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah pada SMK Negeri di Kota Palu,</i>)	Penelitian tesis ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan supervisi manajerial pengawas SMK Negeri di Kota Palu. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Maret s/d mei 2016. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, telah dilakukan survei pada 8 orang Kepala Sekolah di Kota Palu, 58 orang Laboran, dan 20 orang Pustakawan, dan 36 orang TAS pengumpulan data menggunakan instrumen berupa angket Dengan responden 132 Orang tenaga kependidikan pada SMK Negeri di Kota Palu. Hasil penelitian tentang pelaksanaan supervisi manajerial pe-ngawas

¹⁹ Agustina, Eti, "Supervisi Pengawasan dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Guru Mata Pelajaran Rumpun PAI di MIN 1 Tanggamus Kabupaten Tanggamus". 2017. <http://repository.radenintan.ac.id>

		<p>sekolah pada SMK Negeri di Kota Palu berada pada kategori baik (80.28%), berikut disajikan hasil su-pervisi manajerial untuk setiap tenaga kependidikan SMK Negeri di Kota Palu dengan responden Kepala Sekolah berada pada kategori amat baik (92,25 %), responden laboran kategori baik (76,16 %), responden pustakawan kategori baik (78,85 %), dan responden TAS kategori cukup (73,86 %).²⁰</p>
3.	<p>Kustiyani, 2016 (Tesis: <i>Pengelolaan Supervisi Manajerial Pengawas Di Dabin 7 UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi.</i>)</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan supervisi manajerial dilaksanakan melalui tiga tahap yaitu kegiatan awal adalah menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan pengawas di sekolah, menjelaskan format penilaian kinerja kepala sekolah dan menyepakati skenario penilaian kinerja kepala sekolah. Pada kegiatan inti supervisor menilai kinerja Kepala Sekolah. yaitu berkenaan dengan aspek pengelolaan dan administrasi Sekolah dengan langkah-langkah yang telah disepakati bersama sekaligus mencatat hal-hal yang kurang sesuai. Pada kegiatan penutup</p>

²⁰Mustakin. "Analisis Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas Sekolah pada SMK Negeri di Kota Palu", 2016. [Http://eprints.unm.ac.id](http://eprints.unm.ac.id)

		supervisor menjelaskan kepada kepala sekolah tentang hasil penilaian. ²¹
4.	Eka Desi Rahmawati, 2017 (Tesis: <i>Supervisi Manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas</i>)	Tujuan dari penelitian ini, untuk mendapat gambaran tentang pelaksanaan supervisi manajerial yang dilaksanakan oleh Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis merupakan jenis penelitian kualitatif yang berdasarkan data di lapangan dan dokumen-dokumen yang menunjang. Data yang diperoleh dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, sedangkan yang menjadi subjek penelitian adalah pengawas madrasah, kepala madrasah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam melaksanakan kegiatan supervisi manajerial, terdapat langkah-langkah yang digunakan oleh Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas, yaitu: <i>Pertama</i> , menyusun program kerja <i>Kedua</i> , melaksanakan

²¹ Kustiyani. "Pengelolaan Supervisi Manajerial Pengawas Di Dabin 7 UPTD Pendidikan Kecamatan Purwodadi". 2016. *Repository. eprints.ums.ac.id*

		kegiatan inti kepengawasan <i>Ketiga</i> , menetapkan tindak lanjut untuk program pengawasan tahun berikutnya berdasarkan hasil evaluasi komprehensif terhadap seluruh kegiatan pengawasan dalam satu periode. ²²
5.	Wawan Kuniawan, 2014 (Tesis: <i>Peran Pengawas Sekolah dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru.</i>)	Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan alat analisis menggunakan SEM. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis peran pengawas sekolah dan kompetensi manajerial kepala sekolah terhadap kinerja guru dari persepsi para guru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh peran pengawas sekolah dengan kinerja guru dinyatakan tidak signifikan, kompetensi manajerial kepala sekolah berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru dan peran pengawas sekolah berpengaruh signifikan terhadap kompetensi manajerial kepala sekolah. Penelitian ini juga memberikan gambaran bagaimana pola hubungan antara pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru. ²³

²² Rahmawati Desi Eka, "Supervisi Manajerial Pengawas Madrasah Ibtidaiyah di Kecamatan Ajibarang Kabupaten Banyumas", 2017. *repository.iainpurwokerto.ac.id*

²³ Kurniawan Wawan. "Peran Pengawas Sekolah dan Kompetensi Manajerial Kepala Sekolah terhadap Kinerja Guru". 2014. *repository.ipb.ac.id*

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya diantaranya terkait dengan variabel penelitian, objek dan lokasi penelitian serta pemilihan alat analisis yang digunakan berupa metode dengan pendekatan kualitatif.

G. Kerangka Teori

Tugas, tanggung jawab dan wewenang pengawas madrasah sudah begitu sangat jelas sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan PPAI, bab 1 pasal 1 yang menyatakan bahwa: “yang dimaksud pengawas madrasah adalah PNS yang diangkat dalam jabatan fungsional pengawas satuan pendidikan yang tugas, tanggungjawab dan wewenangnya melakukan pengawasan akademik dan manajerial pada madrasah.”²⁴

Adapun tugas pokok pengawas pendidikan sebagaimana PERMENPAN dan RB RI No.21 tahun 2010 Pasal 5 adalah:

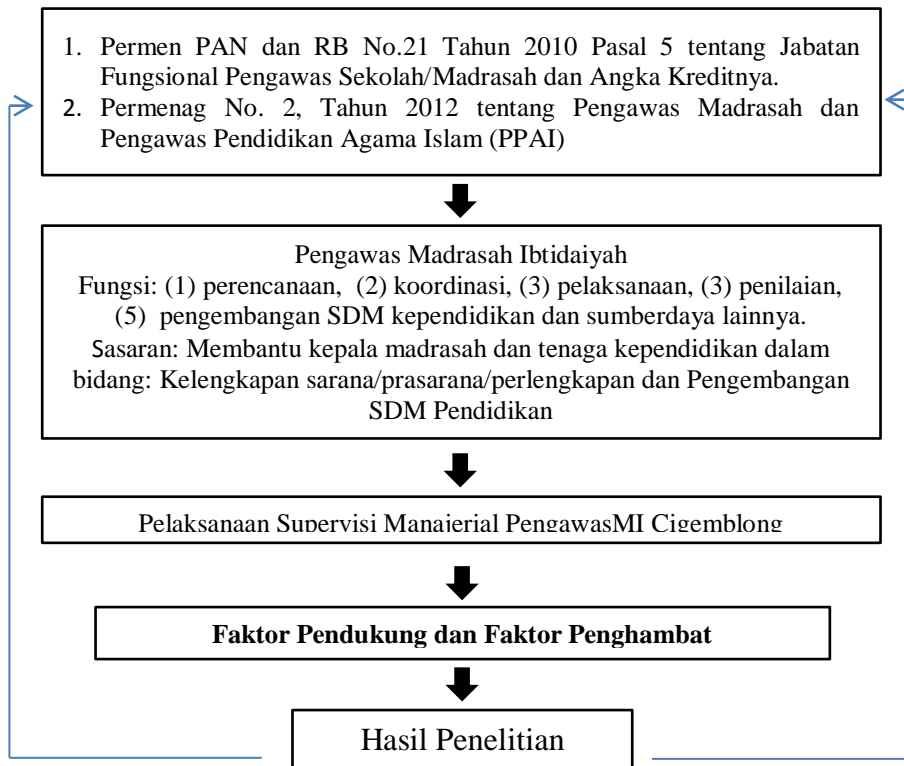
Melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi penyusunan program pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.²⁵

²⁴ Peraturan Menteri Agama (PMA) RI, Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam (PPAI), Bab I Pasal 1, sumber: simpuh.kemenag.go.id diakses 3 April 2019, pukul 08.00.

²⁵ PERMENPAN dan RB Nomor 21 Tahun 2010, Tentang *Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya*, sumber: <http://ditjenpp.kemendiknas.go.id>, diakses 4 April 2019, pukul 20.30.

Oleh karena itu, jika proses supervisi pengawas madrasah dilakukan secara profesional, maka kinerja para pengelola lembaga pendidikan madrasah yang dibinanya akan lebih baik dan profesional. Secara sederhana, kerangka teori yang menjadi landasan penelitian tesis ini dapat dilihat pada bagan berikut:

Bagan 1.1 Kerangka Teori



H. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan tesis ini terdiri dari lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

Bab I: Pada Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Teori serta Sistematika Pembahasan.

Bab II: Kajian Teori Tentang Supervisi Manajerial dan Pengawas Madrasah yang terdiri dari: Supervisi, Manajerial, Supervisi Manajerial, Pengertian Pengawas, Madrasah, Pengawas Sekolah/ Madrasah dan Supervisi Manajerial Pengawas Madrasah.

Bab III: Metodologi penelitian yang meliputi: Pendekatan dan Jenis Penelitian, Tempat dan Waktu Penelitian, Kehadiran Peneliti, Data dan Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data.

Bab IV: Merupakan Hasil Penelitian dan Pembahasan. Terdiri dari: Deskripsi Pelaksanaan Supervisi Manajerial Pengawas di Madrasah Ibtidaiyah se Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak, Faktor Penghambat dan Pendukung serta Hasil yang Dicapai dalam Pelaksanaan Supervisi Manajerial Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V: Adalah penutup yang terdiri dari Simpulan, Implikasi serta Saran-saran.